

PERJALANAN TIMOR TIMUR MENJADI PROVINSI INDONESIA (1975-1999)

Naufal Nursyifa Rizki Widodo¹

¹Pendidikan Sejarah FISIP Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Gunungpati, Semarang
Email: naufal31@students.unnes.ac.id

Abstract: *The history of East Timor as a province of Indonesia from 1975 to 1999 is complex, involving various political, military, and international dynamics. After the Portuguese colonial era, local political groups emerged that fueled tensions, including Fretilin, UDT, and APODETI, until Indonesia finally intervened with a military invasion in 1975 through Operation Seroja. The Balibo Declaration became the formal basis for integrating East Timor as a province of Indonesia in 1976, but resistance from pro-independence groups such as Fretilin and Falintil continued. For more than two decades, the province was a conflict zone with the Indonesian military presence marked by human rights violations, including the Santa Cruz incident in 1991, which attracted global attention. Pressure from the international community and political changes in Indonesia after the New Order during the era of President B.J. Habibie finally led to an independence referendum in 1999. The result was that East Timor separated from Indonesia. This study examines this conflict's background, socio-political dynamics, and long-term impacts on bilateral relations between Indonesia and Timor Leste.*

Keywords: *Integration, Operation Seroja, Referendum, Human Rights.*

Abstrak: Sejarah Timor Timur menjadi provinsi Indonesia dari 1975 hingga 1999 adalah sebuah Sejarah yang kompleks, melibatkan berbagai dinamika politik, militer, dan internasional. Setelah era kolonial Portugis, muncul kelompok-kelompok politik lokal yang memicu ketegangan, termasuk Fretilin, UDT, dan APODETI, hingga akhirnya Indonesia mengintervensi dengan invasi militer pada 1975 melalui Operasi Seroja. Deklarasi Balibo menjadi dasar formal bagi integrasi Timor Timur sebagai provinsi Indonesia pada 1976, namun perlawanan dari kelompok pro-kemerdekaan seperti Fretilin dan Falintil terus berlanjut. Selama lebih dari dua dekade, provinsi ini menjadi medan konflik dengan kehadiran militer Indonesia yang diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia, termasuk insiden Santa Cruz pada 1991 yang memicu perhatian global. Tekanan dari komunitas internasional, serta perubahan politik di Indonesia pasca-Orde Baru, pada zaman Presiden B.J. Habibie akhirnya dibuat referendum kemerdekaan pada 1999. Yang hasilnya membuat Timor-Timur memisahkan diri dari Indonesia. Studi ini mengkaji latar belakang, dinamika sosial-politik, serta dampak jangka panjang dari konflik ini terhadap hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste.

Kata Kunci: Integrasi, Operasi Seroja, Referendum, HAM

PENDAHULUAN

Sejarah Timor Timur, yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste, dalam menjadi bagian dari Indonesia

adalah salah satu babak paling dramatis dan penuh kontroversi dalam sejarah Indonesia modern. Konflik, pergolakan politik, dan perdebatan internasional yang mengelilinginya menambah

kompleksitas cerita ini. Ketika Timor Timur akhirnya diakui sebagai provinsi Indonesia pada tahun 1976, dan bertahan hingga 1999, wilayah ini tidak hanya menjadi objek kebijakan politik, tetapi juga medan pertempuran antara identitas, nasionalisme, dan kebijakan luar negeri Indonesia (Nisfi Sulpina, 2023).

Sebelum 1975, Timor Timur berada di bawah kekuasaan kolonial Portugis selama lebih dari tiga abad. Selama periode tersebut, wilayah ini terisolasi dari perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Namun, di dalam masyarakat Timor Timur, terdapat dinamika internal yang menciptakan ketegangan politik yang akhirnya merembet pada keinginan untuk kemerdekaan. Masyarakat Timor Timur, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya, sudah sejak lama memiliki identitas lokal yang kuat, meski tak terlepas dari pengaruh luar.

Ketika Portugal memutuskan untuk menarik diri dari Timor Timur pada pertengahan 1970-an, wilayah ini terjebak dalam kekosongan politik. Pada saat yang sama, gerakan nasionalisme mulai berkembang pesat di Timor Timur, terutama dengan munculnya dua kelompok besar: Fretilin, yang mendukung kemerdekaan penuh, dan UDT (União Democrática Timorese), yang lebih condong pada hubungan dengan Indonesia atau bahkan Portugal (Monteiro Fátima, 2002). Ketegangan ini semakin memuncak pada 1975, ketika Fretilin mendeklarasikan kemerdekaannya. Ini adalah titik awal bagi intervensi Indonesia, yang melihat stabilitas Timor Timur sebagai bagian integral dari keamanan nasionalnya (Capizzi et al., 1976).

Operasi Seroja, yang dimulai pada Desember 1975, menjadi tonggak penting dalam sejarah Timor Timur. Indonesia, yang khawatir akan ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh proklamasi kemerdekaan Fretilin, memutuskan untuk melakukan intervensi

militer dengan tujuan mengintegrasikan Timor Timur ke dalam NKRI. Operasi ini disertai dengan kekerasan yang meluas dan akhirnya mengarah pada pengambilalihan penuh Timor Timur oleh Indonesia pada 1976. Tindak lanjut dari ini adalah pengesahan status Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia oleh DPR RI.

Namun, meskipun pemerintah Indonesia berhasil menguasai wilayah ini, perlawanan tidak berhenti. Fretilin, bersama kelompok-kelompok lainnya yang pro-kemerdekaan, melanjutkan perlawanan bersenjata yang berlangsung lama. Bagi banyak orang Timor Timur, integrasi dengan Indonesia tidak diterima begitu saja, dan mereka melihatnya sebagai bentuk penindasan terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Di bawah pemerintahan Indonesia, Timor Timur mulai menerima berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk membawa Timor Timur keluar dari keterisolasian, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, banyak dari kebijakan ini yang dipandang oleh sebagian besar warga Timor Timur sebagai bentuk asimilasi, yang memaksakan budaya Indonesia terhadap identitas lokal mereka. Dalam banyak hal, kebijakan pembangunan ini justru memperburuk ketegangan yang sudah ada, mengingat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi militer (Subroto et al., 1997).

Fretilin dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan lainnya terus berperang, meskipun dalam kondisi yang semakin sulit. Dukungan internasional untuk Timor Timur tetap ada, meskipun pada awalnya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia secara signifikan. Selama periode ini, banyak negara, termasuk negara-negara barat dan PBB, mengkritik kebijakan

Indonesia di Timor Timur. Namun, Indonesia tetap pada pendiriannya, menganggap integrasi Timor Timur sebagai bagian dari kepentingan nasional yang lebih besar.

Akhirnya, perubahan besar terjadi dengan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Kejatuhan Soeharto menandai perubahan politik yang signifikan di Indonesia, membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, termasuk terkait dengan status Timor Timur. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia membuka kemungkinan untuk menyelenggarakan referendum di Timor Timur. Setelah banyak tekanan internasional dan dukungan dari negara-negara besar, Indonesia menyetujui dilaksanakannya referendum yang dipantau oleh PBB.

Namun, referendum yang diadakan pada tahun 1999 bukan tanpa risiko. Meskipun hasilnya menunjukkan mayoritas warga Timor Timur memilih kemerdekaan, kekerasan pecah setelah pengumuman hasil referendum. Kelompok pro-integrasi yang didukung oleh militer Indonesia melakukan tindakan kekerasan besar-besaran, yang mengakibatkan kerusakan parah dan banyaknya korban jiwa. Situasi ini akhirnya memaksa intervensi internasional melalui pasukan perdamaian dari PBB, yang dikenal sebagai INTERFET, untuk mengendalikan situasi dan memulai proses transisi menuju kemerdekaan Timor Timur (Winata, B. H. 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian sejarah, pada dasarnya, adalah upaya untuk memahami dan menganalisis peristiwa masa lalu melalui serangkaian metode yang sistematis dan kritis. Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada perjalanan Timor Timur menjadi provinsi Indonesia (1975-1999), pendekatan yang digunakan adalah gabungan dari beberapa metode penelitian sejarah yang dapat

memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik tersebut. Beberapa langkah utama yang akan dibahas dalam metode penelitian ini mencakup: analisis sumber sejarah, teknik kritik sumber, dan pendekatan sejarah sosial-politik, yang semuanya bertujuan untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang dinamika yang terjadi di Timor Timur selama periode tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial-politik. Pendekatan ini penting karena dapat menghubungkan peristiwa sejarah dengan kondisi sosial-politik yang melingkupinya. Timor Timur, dalam periode 1975 hingga 1999, bukan hanya sebuah wilayah geografis, tetapi juga bagian dari geopolitik yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik Indonesia dan politik internasional. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya melihat peristiwa integrasi Timor Timur dalam konteks Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari alur besar sejarah dunia, khususnya yang berkaitan dengan perang dingin, politik blok barat dan timur, serta dampak dari revolusi dan pergeseran kekuasaan di dalam negeri Indonesia.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan untuk melihat hubungan antara masyarakat lokal di Timor Timur dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, serta dampaknya terhadap identitas sosial dan budaya mereka. Proses ini tidak hanya melibatkan kebijakan politik dan militer, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Timor Timur, serta bagaimana perlawanan dan perjuangan kemerdekaan dimobilisasi di tingkat bawah oleh kelompok-kelompok tertentu.

Sumber-sumber utama yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, yang berupa dokumen-dokumen dari periode tersebut, termasuk arsip pemerintah Indonesia, laporan-laporan internasional,

dan surat kabar yang mencatat perkembangan peristiwa-peristiwa penting selama periode 1975-1999, menjadi fondasi utama untuk membangun narasi sejarah yang akurat dan mendalam. Beberapa contoh sumber primer yang relevan antara lain adalah laporan-laporan PBB mengenai situasi di Timor Timur, dokumen internal pemerintah Indonesia terkait kebijakan di Timor Timur, serta catatan dari aktivis kemerdekaan Timor Timur yang menggambarkan perspektif masyarakat lokal.

Selain itu, sumber wawancara dengan saksi sejarah atau narasumber yang terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa tersebut juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Dalam hal ini, wawancara dengan mantan pejabat Indonesia yang terlibat dalam kebijakan di Timor Timur, anggota Fretilin, serta masyarakat Timor Timur yang menjadi saksi hidup dari peristiwa tersebut, dapat memberikan wawasan tambahan yang mendalam. Metode wawancara ini, meskipun lebih subjektif, sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang seringkali tidak tercatat dalam dokumen resmi. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan perasaan individu-individu yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut, yang bisa sangat berbeda dari narasi yang didokumentasikan oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Sumber sekunder juga digunakan untuk mendalami teori-teori sejarah dan analisis yang telah ada sebelumnya. Buku-buku tentang sejarah Indonesia dan Timor Timur, artikel jurnal, serta tesis dan disertasi yang membahas konflik di Timor Timur menjadi rujukan penting untuk membangun konteks yang lebih luas mengenai integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Sumber sekunder ini membantu untuk memetakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, menyusun analisis yang lebih objektif, serta menghubungkan peristiwa-peristiwa

lokal dengan dinamika global yang lebih besar pada masa itu, seperti pengaruh perang dingin dan kebijakan luar negeri negara-negara besar terhadap Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Sejarah dan Kondisi Politik Sebelum 1975

Sejarah Timor Timur adalah kisah panjang tentang penjajahan, perjuangan identitas, dan ketegangan politik yang tidak hanya melibatkan kekuatan kolonial Eropa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pengaruh luar, khususnya dari Indonesia dan kekuatan dunia lainnya, membentuk jalannya peristiwa. Keberadaan Portugis di Timor Timur selama lebih dari 300 tahun tidak hanya meninggalkan jejak kolonial dalam bentuk struktur pemerintahan dan agama, tetapi juga melahirkan ketegangan yang berlarut-larut antara kelompok yang ingin mempertahankan kemerdekaan dan mereka yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Perjalanan ini menjadi lebih kompleks ketika gerakan nasionalisme mulai tumbuh pada 1960-an, yang membawa harapan baru sekaligus tantangan besar bagi rakyat Timor Timur. Ketegangan ini, pada akhirnya, berujung pada konfrontasi yang mengarah pada intervensi Indonesia pada tahun 1975. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor geopolitik, termasuk pengaruh Perang Dingin dan kebijakan Indonesia di bawah Soeharto, memainkan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keputusan politik dan masa depan Timor Timur (Rizky Pratama et al., 2022).

Keberadaan Portugis di Timor Timur tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang hanya terbatas pada pemerintahan administratif semata. Sejak kedatangan mereka pada awal abad ke-16, Portugis memang menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur, meski mereka tidak pernah berhasil sepenuhnya menguasai seluruh pulau. Walaupun pada

permukaan, kolonialisme Portugis di Timor Timur terlihat seperti pengaruh yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan jajahan lainnya, kenyataannya pengaruh mereka tetap membentuk struktur sosial dan politik masyarakat Timor Timur. Sistem feodal yang ada di masyarakat Timor Timur, yang sangat bergantung pada hubungan antara penguasa tradisional dan rakyatnya, tidak banyak berubah meskipun ada kehadiran kekuasaan kolonial (Antara, 1975).

Portugis, lebih banyak terfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan menjaga stabilitas wilayah daripada melakukan modernisasi atau reformasi sosial yang dapat mengubah tatanan masyarakat. Masyarakat Timor Timur tetap mempertahankan adat istiadat dan sistem hierarkis yang telah ada sebelumnya, sementara pengaruh Portugis lebih terasa pada agama Katolik yang diterima oleh sebagian besar masyarakat dan kebijakan pemerintahan yang berpusat di Dili. Namun, meskipun begitu, ada semacam “jarak sosial” yang tercipta antara kelas penguasa kolonial dan rakyat biasa, yang lebih mengutamakan nilai-nilai dan kepercayaan lokal. Pola ini menciptakan struktur sosial yang bertahan cukup lama, bahkan setelah Portugis meninggalkan Timor Timur pada pertengahan abad ke-20.

Ketika Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kepergiannya pada pertengahan 1970-an, ada gelombang besar dalam kesadaran politik di kalangan rakyat Timor Timur. Pengaruh dari gerakan kemerdekaan yang melanda banyak negara di Asia Tenggara, serta dorongan untuk bebas dari cengkeraman kolonial, mendorong lahirnya gerakan-gerakan nasionalis yang lebih terorganisir. Salah satu yang paling menonjol adalah FRETILIN, yang lahir pada 1974, dengan tujuan untuk mengusung kemerdekaan penuh dan menentang segala bentuk pengaruh asing, terutama Indonesia yang dianggap

sebagai ancaman besar. FRETILIN, dengan ideologi sosialisnya, berusaha membangun masyarakat yang lebih adil dan merata, di mana kemiskinan yang merajalela bisa diatasi melalui redistribusi kekayaan.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan visi FRETILIN. Kelompok seperti UDT (União Democrática Timorense) lebih mendukung hubungan yang lebih dekat dengan Portugis dan menolak ide integrasi dengan Indonesia. UDT melihat kemerdekaan sebagai hal yang terlalu berisiko, karena mereka khawatir Timor Timur akan jatuh ke dalam ketidakpastian. Kelompok lainnya, seperti Apodeti, bahkan lebih condong kepada Indonesia dan mendukung gagasan bahwa Timor Timur seharusnya menjadi bagian dari Indonesia (Rustamana et al., 2023). Di antara ketegangan ini, kekuatan-kekuatan internasional seperti Amerika Serikat dan Australia memegang peran besar, mendukung Indonesia untuk memastikan bahwa Timor Timur tidak jatuh ke dalam tangan pemerintahan sosialis yang bisa menjadi bagian dari blok komunis.

Di tengah kekacauan politik ini, Timor Timur mengalami pergolakan hebat. Pada 1975, ketegangan antar kelompok nasionalis mencapai puncaknya. UDT yang merasa terdesak oleh dominasi FRETILIN, berupaya untuk menggulingkan pemerintahan FRETILIN melalui aksi militer. Terjadilah perang saudara yang menewaskan banyak nyawa dan mengguncang stabilitas wilayah ini. Pada saat yang sama, keputusan Portugal untuk mundur semakin memperburuk situasi, karena tak ada kekuatan yang siap untuk menggantikan posisi mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa situasi geopolitik pada saat itu turut memperburuk kondisi di Timor Timur. Indonesia, yang baru saja keluar dari masa-masa genting pasca-peristiwa G30S/PKI pada 1965, berada dalam

kondisi politik yang sangat sensitif terhadap segala bentuk potensi ancaman, terutama yang berhubungan dengan ideologi komunis. Presiden Soeharto, yang baru saja mengambil alih kekuasaan, sangat berhati-hati terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Melihat bagaimana Timor Timur dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang berideologi sosialis, Indonesia mulai melihat wilayah ini sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan kawasan. Indonesia yang melihat komunisme sebagai musuh utama dalam kebijakan luar negerinya, merasa bahwa pengaruh FRETILIN di Timor Timur harus dihentikan agar tidak menular ke wilayah Indonesia (Indrawan, 2015).

Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan dunia lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia, juga turut memainkan peran dalam menciptakan ketegangan ini. Australia, sebagai tetangga terdekat Indonesia, sangat khawatir jika Timor Timur merdeka dan jatuh ke tangan FRETILIN, karena bisa menambah ketidakstabilan di kawasan yang mereka anggap sangat strategis. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, melihat Indonesia sebagai sekutu penting dalam menghadapi ancaman komunis di Asia, sehingga mendukung kebijakan Indonesia dalam menghadapi Timor Timur (Sholahudin Fajar, 2017).

Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya mempertahankan stabilitas politiknya tetapi juga berusaha mengatasi potensi ancaman komunis di Timor Timur dengan mengintervensi wilayah tersebut pada 1975. Keputusan ini, meskipun dipandang oleh banyak pihak sebagai langkah untuk menjaga integritas negara, juga menciptakan dinamika baru yang sangat kompleks antara Indonesia, rakyat Timor Timur, dan dunia internasional.

2. Operasi Integrasi Timor Timur (1975-1976)

Ketika Portugal memutuskan untuk meninggalkan Timor Timur pada tahun 1974, wilayah tersebut seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada harapan untuk kemerdekaan, namun di sisi lain, ada ketegangan yang terus berkembang antara kelompok yang ingin bergabung dengan Indonesia dan mereka yang ingin membangun negara merdeka yang terpisah. Keputusan Indonesia untuk melakukan Operasi Seroja pada 1975 sebuah intervensi militer yang mengubah jalannya sejarah Timor Timur—tidak hanya dilandasi oleh kepentingan politik dalam negeri, tetapi juga oleh perhitungan geopolitik yang lebih besar, terutama dalam konteks Perang Dingin. Namun, meskipun operasi ini sering dipandang sebagai langkah yang sah untuk menjaga integritas wilayah Indonesia, hasil dan dampaknya tetap menjadi topik kontroversial yang terus diperdebatkan, baik di dalam negeri maupun internasional (Mahendra et al., 2021).

Saat Operasi Seroja dimulai pada Desember 1975, tujuan utama Indonesia jelas: mengamankan Timor Timur dan menghindari potensi ancaman dari kelompok yang mendukung kemerdekaan, khususnya FRETILIN, yang cenderung condong ke arah komunisme. Indonesia, yang baru saja keluar dari masa-masa penuh ketegangan akibat G30S/PKI, melihat segala bentuk ideologi sosialis atau komunis di dekat perbatasannya sebagai ancaman yang harus segera dihentikan. Meskipun begitu, meskipun operasi ini dirancang dengan efisiensi militer yang tinggi, ia tidak lepas dari pengorbanan yang besar. Dalam pertempuran sengit yang terjadi, banyak nyawa yang hilang, baik dari pihak Indonesia, FRETILIN, maupun warga sipil yang terjebak dalam konflik tersebut.

Operasi ini, meskipun berhasil mengalahkan pasukan FRETILIN dan menguasai wilayah Timor Timur, meninggalkan bekas yang sangat dalam di masyarakat Timor Timur. Banyak

laporan internasional yang menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama operasi ini—seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyiksaan—yang hanya memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Namun, meskipun kritik internasional semakin kuat, Indonesia tetap dapat mengendalikan narasi dan terus menegaskan bahwa mereka bertindak demi menjaga kestabilan kawasan. Di satu sisi, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia mendukung langkah Indonesia, sementara negara-negara Eropa dan beberapa negara dunia ketiga menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Namun, hal yang sering terlupakan dalam diskusi mengenai Operasi Seroja adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Timor Timur. Dalam keinginan Indonesia untuk mengamankan wilayahnya, tak jarang kita melupakan suara rakyat Timor Timur itu sendiri—yang terbelah antara mereka yang menginginkan kemerdekaan dan mereka yang berharap bisa bergabung dengan Indonesia. Keinginan untuk integrasi yang cepat, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-politik yang ada di Timor Timur, menjadikan proses ini lebih kompleks dan menyakitkan bagi banyak orang.

Setelah Operasi Seroja, Indonesia dihadapkan pada tantangan diplomatik besar: bagaimana meyakinkan dunia bahwa Timor Timur sekarang adalah bagian yang sah dari Indonesia. Diplomasi Indonesia tidak hanya menghadapi perlawanan dari negara-negara yang menginginkan Timor Timur merdeka, tetapi juga negara-negara yang khawatir tentang pengaruh Indonesia yang semakin kuat di kawasan Asia Tenggara.

Di tingkat internasional, Indonesia berusaha keras mendapatkan pengakuan terhadap integrasi Timor

Timur. Salah satu langkah utama Indonesia adalah mendekati negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara anggota PBB untuk mendukung posisi Indonesia. Indonesia menekankan bahwa stabilitas kawasan adalah hal yang jauh lebih penting daripada prinsip-prinsip idealis mengenai hak menentukan nasib sendiri. Melalui jalur diplomatik ini, Indonesia tidak hanya mempertahankan dukungan dari negara-negara Barat, tetapi juga mencoba membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara non-blok, yang pada gilirannya memberi mereka legitimasi lebih besar di mata dunia (Yossa, E. 2016).

Namun, perjalanan diplomatik Indonesia tidaklah mudah. Negara-negara seperti Portugal dan negara-negara yang mendukung gerakan kemerdekaan sering menuntut agar Indonesia menghentikan kebijakan integrasi yang dipaksakan dan memberikan rakyat Timor Timur kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Meskipun Indonesia menghadapinya dengan diplomasi yang lihai, kritikan internasional tetap berlanjut, dan dalam banyak kasus, Indonesia harus menghadapi desakan untuk melakukan perubahan kebijakan.

Namun, jika kita melihatnya dari perspektif lain, diplomasi Indonesia bisa dipahami sebagai upaya yang berakar pada kebutuhan untuk menjaga integritas dan kestabilan nasional. Indonesia, sebagai negara yang besar dan beragam, tentunya merasa bahwa integrasi Timor Timur adalah langkah yang harus diambil untuk mencegah perpecahan yang lebih luas. Meskipun tak dapat disangkal bahwa ada pelanggaran dan ketidakadilan yang terjadi selama periode tersebut, namun diplomasi Indonesia juga mencerminkan keinginan untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan negara tetangga dan dunia internasional (Liani et al., 2024).

Puncaknya, pada 31 Mei 1976, Indonesia mengumumkan secara resmi

bahwa Timor Timur kini menjadi provinsi ke-27 Indonesia melalui Deklarasi Balibo. Deklarasi ini dianggap sebagai momen yang menegaskan dominasi Indonesia atas wilayah yang telah dikuasai sejak Operasi Seroja, sekaligus membungkus proses integrasi dengan legitimasi hukum.

Deklarasi Balibo, meskipun disambut baik oleh sebagian orang di Indonesia, tidaklah diterima dengan hangat di Timor Timur. Di tengah euforia di Jakarta, Timor Timur tetap menyimpan luka yang dalam. Ketika DPR RI mengesahkan penggabungan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia pada 17 Juli 1976, tidak ada perayaan besar di Dili. Sebaliknya, ini adalah keputusan yang dipaksakan dan diterima oleh sebagian rakyat Timor Timur dengan rasa terpaksa, mengingat masih adanya kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan (Syahbuddin, 2020).

Bagi Indonesia, deklarasi ini mungkin terlihat seperti kemenangan diplomatik dan militer, namun bagi rakyat Timor Timur, ini adalah awal dari babak baru dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan yang berlangsung hingga tahun 1999. Bagaimana pun juga, Deklarasi Balibo dan pengesahan oleh DPR RI mencerminkan keteguhan Indonesia dalam mempertahankan integritas wilayahnya, meskipun pada akhirnya langkah ini justru menciptakan luka sejarah yang sulit untuk dilupakan oleh banyak pihak.

3. Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia (1976-1999)

Perjalanan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah bangsa ini. Selama lebih dari dua dekade, wilayah yang terletak di ujung timur Indonesia ini menjadi tempat pertempuran ideologis, politik, dan militer yang tidak hanya mengubah wajah sosial-

ekonomi Timor Timur, tetapi juga membawa dampak yang mendalam bagi hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Bagi banyak orang Timor Timur, integrasi dengan Indonesia bukanlah sebuah proses yang membawa harapan dan kesejahteraan, melainkan sebuah kenyataan pahit yang menghilangkan identitas dan impian kemerdekaan mereka.

Di balik narasi pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia, terdapat banyak hal yang terlupakan terutama penderitaan masyarakat Timor Timur yang harus menghadapi berbagai kebijakan yang lebih mengarah pada kontrol dan dominasi. Di satu sisi, memang ada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang mungkin memberikan kemajuan dalam aspek tertentu. Namun, sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar menguntungkan masyarakat Timor Timur secara adil. Dalam banyak kasus, pembangunan ini lebih berfungsi sebagai alat untuk memperkuat dominasi Indonesia terhadap wilayah yang baru saja menjadi provinsi ke-27 ini.

Pengiriman penduduk Jawa yang masif ke Timor Timur, misalnya, mengarah pada marginalisasi masyarakat lokal yang merasa hak-hak mereka terabaikan. Ketika masyarakat Timor Timur melihat pengaruh luar semakin kuat dan merambah ke berbagai sektor kehidupan, perasaan alienasi dan ketidakadilan semakin menguat. Program-program pembangunan tersebut, yang sering kali dianggap sebagai bukti niat baik pemerintah Indonesia, pada kenyataannya justru memperburuk ketimpangan sosial

antara penduduk asli dan imigran. Meskipun ada upaya yang tulus dari segelintir individu dalam pemerintah Indonesia untuk membawa kemajuan, kenyataan politik dan sosial yang ada tidak menunjukkan hal tersebut sebagai sesuatu yang benar-benar menguntungkan masyarakat Timor Timur secara menyeluruh.

Di sisi lain, dampak buruk dari pembangunan yang tidak adil ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial. Pemindahan paksa yang dilakukan untuk membuka lahan bagi proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya dan jembatan, memaksa ribuan keluarga meninggalkan tanah mereka. Apa yang dilupakan dalam narasi besar ini adalah hubungan masyarakat Timor Timur dengan tanah mereka anah yang bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga tempat di mana identitas budaya dan spiritual mereka berkembang. Pemindahan paksa ini adalah bagian dari proses dehumanisasi yang lebih luas, di mana rakyat Timor Timur dipaksa untuk beradaptasi dengan cara hidup yang asing bagi mereka (Neonbasu et al., 1997).

Ketika melihat panjangnya perjuangan FRETILIN, kenyataan bahwa konflik ini bukan hanya masalah politik atau militer, tetapi juga sebuah konflik yang menghancurkan jiwa dan kehidupan rakyat Timor Timur. Perlawanan bersenjata oleh FRETILIN bukanlah hal yang bisa dipandang hanya dari sudut pandang militer. Sebaliknya, itu adalah cerminan dari perasaan keterasingan yang mendalam keterasingan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap menindas, dan keterasingan terhadap

identitas budaya mereka yang semakin terancam.

Perlawanan FRETILIN adalah manifestasi dari keinginan untuk bebas, yang berakar pada hak dasar manusia untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun, meskipun tujuan mereka mulia, perjuangan ini tidak bebas dari kontroversi. Dalam banyak kasus, FRETILIN pun tidak lepas dari kesalahan dalam memperlakukan rakyat sipil yang terjebak dalam pertempuran. Taktik perang gerilya yang diterapkan sering kali menyebabkan penderitaan rakyat yang lebih luas, mengingat banyak dari mereka tidak memilih untuk terlibat dalam konflik ini.

Penderitaan yang dihadapi masyarakat Timor Timur akibat perang saudara ini terasa lebih dalam ketika kita merenungkan betapa banyaknya jiwa yang hilang tanpa sebab yang jelas. Di satu sisi, ada rasa hormat terhadap mereka yang berjuang demi kemerdekaan, tetapi di sisi lain, kita juga harus kritis terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh perang itu sendiri. Pada akhirnya, konflik ini hanya mengarah pada penghancuran lebih lanjut, di mana baik rakyat Indonesia maupun Timor Timur merasakan dampak dari kebijakan dan keputusan yang diambil di luar jangkauan mereka (Makari et al., 2003).

Seiring berjalannya waktu, tekanan dari komunitas internasional terhadap Indonesia semakin meningkat. Negara-negara dan organisasi internasional mulai mengkritik keras kebijakan Indonesia di Timor Timur. Namun, kritik tersebut lebih sering kali terjebak dalam dilema geopolitik yang kompleks, di mana banyak negara

besar, termasuk Amerika Serikat, memilih untuk tidak melawan Indonesia demi menjaga hubungan strategis dalam menghadapi ancaman komunis pada masa Perang Dingin.

Di sisi lain, gerakan solidaritas global yang memperjuangkan hak asasi manusia di Timor Timur mulai berkembang pesat. Meskipun tidak dapat mengubah secara langsung nasib Timor Timur, gerakan ini memberikan kesadaran internasional yang penting tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut. Kampanye embargo senjata dan pemberian tekanan diplomatik kepada Indonesia menjadi wujud nyata dari solidaritas global terhadap perjuangan Timor Timur.

4. Transisi Menuju Referendum dan Kemerdekaan (1998-1999)

Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis politik yang mendalam yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kejatuhan rezim Soeharto ini, yang disebabkan oleh serangkaian faktor seperti krisis ekonomi Asia, ketidakpuasan terhadap otoritarianisme, dan gerakan pro-demokrasi yang semakin meluas, menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Namun, bagi Timor Timur, krisis ini juga membawa sebuah peluang baru sebuah harapan untuk mewujudkan impian mereka akan kemerdekaan setelah lebih dari dua dekade berada di bawah kekuasaan Indonesia. Perubahan besar dalam politik Indonesia ini memberikan momentum bagi penyelesaian masalah Timor Timur yang telah lama terabaikan dan

menjadi sumber ketegangan internasional (Lapian A. B, et al., 1988).

Reformasi di Indonesia memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap situasi di Timor Timur. Kejatuhan Soeharto tidak hanya menandakan berakhirnya era otoritarianisme, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan politik dan sosial yang lebih luas di Indonesia. Dengan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998, dan digantikannya oleh Presiden B.J. Habibie, Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi. Salah satu keputusan paling penting yang diambil oleh Habibie terkait Timor Timur adalah mengumumkan kemungkinan untuk mengadakan referendum mengenai status politik wilayah tersebut.

Keputusan ini, meskipun kontroversial dan menantang bagi banyak pihak di Indonesia, merupakan langkah pertama yang krusial menuju resolusi konflik yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Keputusan Habibie untuk memberi kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih nasib mereka sendiri merupakan sebuah keberanian yang luar biasa. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan perubahan besar dalam politik Indonesia, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengatasi masalah ini secara damai, meskipun tidak tanpa risiko. Keputusan ini memberikan harapan bagi rakyat Timor Timur yang selama bertahun-tahun telah menderita di bawah kebijakan militeristik Indonesia. Namun, di balik keberanian itu, ada juga keraguan apakah pemerintah Indonesia benar-benar siap menerima

hasil referendum yang mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka.

Namun, reformasi ini juga membawa dampak buruk lainnya bagi Timor Timur, terutama terkait dengan meningkatnya ketegangan di dalam negeri. Kelompok-kelompok pro-integrasi yang masih setia pada Indonesia mulai merasa terancam, dan ketegangan semakin meningkat. Di sisi lain, kelompok pro-kemerdekaan, yang selama ini tertekan, kini merasa bahwa saatnya untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang lebih terbuka. Dengan ketegangan yang meningkat ini, perjalanan menuju referendum tampak semakin tidak pasti.

Salah satu langkah kunci dalam proses menuju kemerdekaan Timor Timur adalah peran penting yang dimainkan oleh PBB. Setelah keputusan Habibie untuk mengadakan referendum, pemerintah Indonesia dan PBB mengadakan serangkaian pertemuan untuk menyusun mekanisme pelaksanaan referendum yang adil dan damai. Pada akhirnya, pada Mei 1999, setelah serangkaian pembicaraan panjang, Indonesia menyetujui rencana PBB yang menetapkan bahwa rakyat Timor Timur akan memilih antara otonomi khusus dalam kerangka negara Indonesia atau kemerdekaan penuh (Lorraine Rangga Boro, 2014).

Dapat dilihat sebuah ada perubahan paradigmatik dalam pendekatan Indonesia terhadap masalah Timor Timur. PBB memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan transparansi dan keadilan proses referendum, dengan misi khusus yang diberi nama UNAMET (United Nations Mission

in East Timor). Dalam hal ini, PBB tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa rakyat Timor Timur diberi kesempatan untuk memilih tanpa intimidasi.

Proses referendum yang berlangsung pada 30 Agustus 1999 ini membawa hasil yang mengejutkan bagi banyak pihak. 88,5% suara memilih kemerdekaan, menandakan bahwa rakyat Timor Timur lebih memilih untuk berpisah dari Indonesia dan membentuk negara merdeka. Hasil referendum ini adalah kemenangan bagi semangat kemerdekaan dan sebuah pembuktian bahwa rakyat Timor Timur, meskipun menghadapi tekanan luar biasa selama bertahun-tahun, tetap teguh pada keyakinan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Tidak lama setelah hasil referendum diumumkan, kekerasan melanda Timor Timur. Kelompok-kelompok milisi yang didukung oleh Indonesia, yang menentang kemerdekaan, mulai melakukan serangkaian pembalasan yang brutal terhadap para pendukung kemerdekaan dan warga sipil. Kota-kota besar seperti Dili hancur, rumah-rumah dibakar, dan ribuan orang terpaksa melarikan diri ke tempat-tempat pengungsian. Kekerasan ini merupakan titik balik tragis yang menodai proses referendum dan menciptakan krisis kemanusiaan yang luar biasa (Hudaya et al., 2019).

Di tengah kekacauan tersebut, intervensi internasional menjadi sangat penting. Pada 20 September 1999, setelah melalui banyak pertimbangan dan tekanan internasional, pasukan multinasional

yang dipimpin oleh Australia, yang dikenal dengan nama INTERFET (International Force for East Timor), dikerahkan ke Timor Timur untuk menstabilkan situasi dan menghentikan kekerasan. INTERFET bekerja sama dengan PBB untuk mengamankan wilayah dan melindungi warga sipil, serta memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan (Wardhani. 2000).

Misi INTERFET ini, meskipun datang terlambat, menunjukkan solidaritas internasional yang sangat dibutuhkan dalam mencegah tragedi yang lebih besar. Namun, dunia internasional seharusnya bertindak lebih cepat. Keputusan untuk menunggu hingga terjadi kekerasan besar-besaran sebelum bertindak menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakpedulian terhadap nasib rakyat Timor Timur yang sudah terlalu lama menderita.

Pada akhirnya, meskipun terdapat kekerasan dan kerusakan yang luas, misi internasional dan kehadiran pasukan PBB berhasil membawa Timor Timur menuju kemerdekaan yang sah. Setelah berbulan-bulan menunggu, pada 20 Mei 2002, Timor Timur akhirnya menjadi negara merdeka yang diakui oleh dunia internasional, menutup babak panjang dari perjuangan rakyatnya untuk bebas dari penjajahan dan penindasan.

KESIMPULAN

Perjalanan Timor Timur dari tahun 1975 hingga 1999 menuju kemerdekaan merupakan salah satu bab yang penuh konflik dan pertanyaan moral dalam sejarah

kawasan Asia Tenggara. Pada satu sisi, ada dorongan kuat dari Indonesia untuk mengintegrasikan Timor Timur demi stabilitas nasional dan geopolitik, sementara di sisi lain, ada aspirasi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri, yang sering kali diabaikan oleh kekuatan besar. Melalui empat sub-bab yang telah dibahas, yaitu Latar Belakang Sejarah dan Kondisi Politik Sebelum 1975, Operasi Integrasi Timor Timur (1975-1976), Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia (1976-1999), dan Transisi Menuju Referendum dan Kemerdekaan (1998-1999), kita dapat melihat bagaimana peristiwa tersebut tidak hanya menyangkut aspek politik dan militer, tetapi juga mengenai moralitas, kemanusiaan, dan hak asasi.

Latar belakang kolonialisme Portugis di Timor Timur menggambarkan bagaimana sebuah bangsa kecil dikuasai oleh kekuatan eksternal selama berabad-abad, membentuk karakter politik dan sosialnya. Peran Portugis dalam memperkenalkan agama Katolik dan membangun struktur elit lokal meninggalkan warisan yang rumit. Namun, yang paling mencolok adalah bagaimana kolonialisme menciptakan ketergantungan, sehingga ketika Timor Timur mencoba memerdekakan diri, negara ini terjebak dalam konflik internal.

Di sinilah munculnya nasionalisme lokal memainkan peran penting. Namun, ada suatu hal yang belum terpecahkan bagaimana seharusnya gerakan seperti Fretilin dan UDT berkoordinasi dalam perjuangan mereka. Ada perpecahan antara mereka bukan hanya masalah strategi politik, tetapi juga sebuah cerminan dari pengaruh luar yang

berusaha mengendalikan arah pergerakan Timor Timur. Dalam konteks ini, pengaruh Indonesia dan kekuatan dunia lainnya menjadi semakin jelas. Kebijakan anti-komunisme Soeharto mungkin memiliki logika tersendiri pada masa itu, ancaman komunisme di Timor Timur sebesar yang dikhawatirkan menguasai wilayah.

Operasi Seroja, yang diluncurkan Indonesia pada tahun 1975, adalah salah satu peristiwa yang sulit dibenarkan dari perspektif moral. Operasi militer ini mungkin sukses secara taktis, namun apakah benar perlu untuk dilakukan dengan skala kekerasan yang demikian besar. Penggunaan kekuatan militer dalam kasus ini adalah refleksi dari ketakutan Indonesia akan disintegrasi. Ada cara lain yang lebih manusiawi untuk mendekati Timor Timur. Tujuan operasi untuk menstabilkan Timor Timur mungkin terdengar mulia, namun hasilnya adalah kebalikannya ketidakstabilan yang terus berlangsung selama bertahun-tahun.

Pada peran diplomasi Indonesia yang tampak kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan internasional atas integrasi Timor Timur, tetapi di sisi lain, tindakan-tindakan militer di lapangan justru menggerus legitimasi mereka. Deklarasi Balibo, misalnya, yang dianggap sebagai landasan integrasi, dari sudut pandang internasional terasa kurang sah karena dilakukan di tengah-tengah kekerasan.

Setelah integrasi, kebijakan pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di Timor Timur merupakan langkah yang seharusnya

bermanfaat, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Pembangunan infrastruktur, sekolah, dan rumah sakit mungkin membawa dampak positif bagi sebagian masyarakat.

Perlawanan bersenjata Fretilin, meskipun dipandang oleh Indonesia sebagai pemberontakan yang harus dihancurkan, ini adalah simbol kuat dari keberanian rakyat Timor Timur untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka. Konflik ini tidak hanya perang antara militer, tetapi juga perang ideologi dan hak asasi. Konflik ini membawa dampak besar, tidak hanya bagi para pejuang, tetapi juga bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Timor Timur, yang terperangkap dalam kekerasan, ketidakpastian, dan represi (Slamet et al., 1977).

Dunia internasional, terutama PBB, tampaknya lambat dalam merespons. Ketika laporan pelanggaran hak asasi manusia mulai terungkap, komunitas global akhirnya bereaksi dengan kampanye hak asasi manusia dan embargo senjata. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 membuka babak baru dalam sejarah Timor Timur. Jatuhnya rezim Soeharto membawa harapan bagi rakyat Timor Timur untuk akhirnya mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia untuk pertama kalinya membuka pintu bagi solusi damai melalui referendum. Meskipun mungkin ada tekanan dari dunia internasional, Habibie berhasil menangkap peluang untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Timor Timur dan dunia.

Namun, kekerasan yang terjadi setelah referendum 1999, di mana milisi pro-integrasi dan elemen

militer Indonesia terlibat, adalah tragedi yang mencoreng proses ini. Peristiwa ini adalah bukti bahwa di tengah transisi politik, masih banyak pihak yang belum siap untuk menerima kenyataan bahwa Timor Timur akan menjadi negara merdeka. Di sinilah peran Pasukan Internasional untuk Timor Timur (INTERFET) menjadi krusial. Kehadiran mereka memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan dan memungkinkan transisi yang lebih damai menuju kemerdekaan.

Pada akhirnya, kemerdekaan Timor Timur pada tahun 2002 adalah kemenangan bagi hak asasi manusia dan perjuangan panjang untuk kebebasan. Namun, perjalanan ini meninggalkan luka mendalam, tidak hanya bagi rakyat Timor Timur, tetapi juga bagi hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional. Proses ini menunjukkan kepada kita bahwa kebebasan tidak pernah datang dengan mudah dan bahwa harga yang harus dibayar sering kali sangat mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antara. (1975, July 21). Timor Portugis Akan Merdeka Tahun 1978. Antara.
- Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste. (2010). Chenga! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste – Volume II. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Makarin, Zacky Anwar. (2003). Hari-Hari Terakhir Timor-Timur: Sebuah Kesaksian. Jakarta: PT. Sportif Media Informasindo.
- Neonbasu, P. Groger. (1997). Peta Politik dan Dinamika Pembangunan Timor Timur. Jakarta: Yanense Mitra Sejati.
- Nevins, J. (2008). Pembantaian Timor Timur dan Horor Masyarakat Internasional. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
- Slamet, M., & Machmuddin, N. (1977). Lahirnya Propinsi Timor Timur: Dokumentasi tentang Proses Dekolonisasi Timor Timur dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Jakarta: Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia/BP. ALDA.
- Subroto, Hendro. (1997). Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Smith, A. L. (2002). Timor Leste, Timor Timur, East Timor, Timor Lorosa'e. Southeast Asian Affairs, 54-77.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah:

- Ervanda, B. Y. (2016). PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI-AU) DALAM OPERASI SEROJA DI TIMOR TIMUR TAHUN 1975-1979. Risalah, 3(9).
- Capizzi, E., Hill, H., & Macey, D. (1976). FRETILIN and the struggle for independence in East Timor. *Race & Class*,

- 17(4), 381–395. doi: 10.1177/030639687601700403
- Hudaya, F., Zed, M., & Hardi, E. (2019). TINJAUAN HISTORIOGRAFI TENTANG KEKERASAN DI TIMOR TIMUR (1976-1999) DALAM SASTRA INDONESIA: SAKSI MATA. *Gelombang Sejarah*, 118–140.
- Indrawan, J. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Timor Timur sebelum Kemerdekaannya dari Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Retrieved from <http://www.titiandamai.or.id/konten.ph>
- Lapian A. B dan JR. Chaniago.(1988).Timor-timur dalam Gerak Pembangunan.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Invent Arisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Lorraine Rangga Boro. (2014). JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT SIPIL PASCA KONVENSI JENEWA 1949. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 380–387.
- Liani, H. N., Pajar, I. A. N., Syauqi, A. H., & Fauzan, R. (2024). KAJIAN SEJARAH KONTROVERSI INTEGRASI TIMOR TIMUR: APAKAH SUDAH SESUAI FAKTA ATAU HANYA REKAYASA BELAKA. Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 3(1), 1-10.
- Mahendra, M. A., Rusadi, E. Y., & Dzakiruddin, M. (2021). *Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal* (Vol. 4, Issue 1).
- Monteiro Fátima. (2002). *PT_ADN_IEEI_006_0242_Timor As licoes da história Fátima Monteiro*.
- Nisfi Sulpina. (2023). Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999. *KALA MANCA: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH*, 11(1), 13–18.
- Rizky Pratama, M., & Ciciria, D. (2022). INTEGRASI TIMOR TIMUR DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA (1976-1999). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4, 1. Retrieved from <http://eskrispi.stkippgribl.ac.id/>
- RustamanaMPd, A., Si, M., Ghefira, A. S., Narendra, D., Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl Raya Ciwaru No, P., & Correspondence, B. (2985). *PROSES INTEGRASI DAN TERLEPASNYA TIMOR-TIMUR TERHADAP INDONESIA* (Vol. 5624, Issue 4). Retrieved from <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>

- Sholahudin Fajar, A. M. (2017). Tangan-Tangan Barat di Timor Timur: Keterlibatan Portugal, Australia, dan Amerika Serikat Dalam Masalah Timor Timur Dari Indonesia Tahun 1976-1999 (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Syahbuddin. (2020). Proses Dekolonisasi Republik Demokratik Timor-Leste dan Keterlibatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 10, 108–120. Retrieved from <https://kbbi.web.id/kolonialisme>,
- Siahaan, H., Setyadi, Y., & Romainur, R. (2021). Analisa Yuridis Kasus Pelanggaran HAM Berat Timor Timur dan Upaya Penyelesaian oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(1), 99-106.
- Wardhani, W. (2000). Identifikasi Permasalahan Dan Kendala Misi Bantuan Perserikatan Bangsa Bangsa Di Timor Timur (Unamet).
- Yossa, E. (2016). UPAYA DIPLOMATIK MENTERI LUAR NEGERI ALI ALATAS DALAM MEMPERTAHANKAN TIMOR-TIMUR (1987-1999). *Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta*.